



LAPORAN KINERJA

2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA TIMUR

Jl. Jkt Garden City Boulevard, RT.11/RW.8, Cakung
Tim., Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 13910

 (021) 4680 2302-2303-2304

 @pajakmdy2jaktim



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Timur tahun 2024, Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) dibuat antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif serta sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Timur menuju terwujudnya *good governance* sesuai dengan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 serta dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan KPP Madya Dua Jakarta Timur selama tahun 2024.

Maka dari itu, untuk memenuhi kewajiban serta menjawab segala harapan dan tantangan di masa yang akan datang, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Timur tahun 2024.

Jakarta, 24 Januari 2024

Kepala KPP Madya Dua Jakarta Timur



Ditandatangani secara elektronik
Immanuel Ambarita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sistematika Laporan.....	5
Bab II Perencanaan Kinerja.....	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2. Realisasi Anggaran.....	64
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
3.4. Kinerja Lain-lain.....	65
3.5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	67
Bab IV Penutup.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Timur adalah salah satu dari 352 kantor pelayanan pajak yang memiliki visi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Madya terbaik dan mitra Wajib Pajak yang mendukung terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dan tercapainya target penerimaan pajak serta misi yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif bagi seluruh Wajib Pajak terdaftar.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur meliputi seluruh wilayah Kota Administratif Jakarta Timur berdasarkan pengawasan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur yang berbasis kepada Wajib Pajak Strategis dan tidak berbasis kewilayahan.

1.1. Latar Belakang

Dasar penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) antara lain mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK,01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK,01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Timur yang resmi beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Timur merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Timur sebagai bagian Direktorat Jenderal Pajak turut berperan serta dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak memiliki peta strategis dengan menggambarkan bahwa penerimaan pajak negara yang optimal akan diperoleh dari kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Untuk mencapai kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi itulah dibuat berbagai program dan kegiatan antara lain pelayanan dan penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kegiatan pelayanan dan penyuluhan harus memperhatikan tingkat pelayanan prima dan peningkatan efektivitas penyuluhan kepada Wajib

Pajak, Kegiatan pengawasan dilakukan dengan meningkatkan keandalan data Wajib Pajak dan pengendalian mutu yang optimal. Kegiatan penegakan hukum dilaksanakan dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan, penagihan, penilaian, serta penyidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pada semua level jajaran di Direktorat Jenderal Pajak yang pada akhirnya akan diukur efektifitas kerjanya dari realisasi penerimaan yang diperbandingkan dengan target yang ditetapkan pada setiap tahunnya.

Tahun 2024, KPP Madya Dua Jakarta Timur berhasil merealisasikan target penerimaan pajak sebesar 100,06% atau sebesar Rp8.075.559.258.883 dari target yang diberikan sebesar Rp8.070.586.473.000 dan target kanwil sebesar Rp30.427.032.337.000 atau sebesar 26,54% dari target penerimaan kanwil.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

- Tugas

Dalam kedudukannya, KPP Madya Dua Jakarta Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Madya Dua Jakarta Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

- Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Dua Jakarta Timur memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- Seksi Pelayanan;
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- Seksi Pengawasan I;
- Seksi Pengawasan II;
- Seksi Pengawasan III;
- Seksi Pengawasan IV;
- Seksi Pengawasan V;
- Seksi Pengawasan VI; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
 - Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak
 - Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

- Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur dibantu oleh Kepala Seksi, Kepala Subbag, *Account Representative*, Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, Kelompok Fungsional Penyuluh Pajak, Asisten Fungsional Penyuluh Pajak, Kelompok Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

1. Data jumlah pegawai per tanggal 31 Desember 2024

Unit Organisasi	Es III	Es IV	Pemeriksa Pajak	Penyuluh Pajak	Penilai Pajak	AR	Pelaksana	Juru Sita	Total
KPP	1		29						30
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		1					10		11
Penjaminan Kualitas Data		1					3		4
Pelayanan		1		5			7		13
Pengawasan I		1				6			7
Pengawasan II		1				6	1		8
Pengawasan III		1				6	1		8
Pengawasan IV		1				5			6
Pengawasan V		1				5	1		7
Pengawasan VI		1				6			7
Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan		1			1		3	3	8
Total	1	10	29	5	1	34	26	3	109

2. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin per tanggal 31 Desember 2024

Unit Organisasi	Jenis Kelamin		Total
	Laki Laki	Perempuan	
Jumlah Pegawai	78	31	109

3. Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per tanggal 31 Desember 2024

Unit Organisasi	Tingkat Pendidikan					Total
	Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Sederajat	D I	D III	Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	Pasca Sarjana (S2)	
Jumlah Pegawai	3	17	11	54	24	109

- Inovasi KPP Madya Dua Jakarta Timur

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta pembangunan dan/atau keberlanjutan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPP Madya Dua Jakarta Timur terus mengoptimalkan dan menambah inovasi terbaru. Serta dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025, KPP Madya Dua Jakarta Timur membentuk Tim Kerja Kantor Pelayanan Terbaik (KPT), di tahun 2024 KPP Madya Dua Jakarta Timur berhasil menjadi Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur pada tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan dan meraih predikat WBBM serta Kantor Pelayanan Terbaik, KPP Madya Dua Jakarta Timur memiliki beberapa inovasi sebagai berikut:

- 1) Inovasi Aplikasi Antrean
- 2) Inovasi Implementasi Pengarusutamaan Gender pada Fasilitas Pelayanan
- 3) Inovasi Survei Kepuasan Masyarakat
- 4) Inovasi Aplikasi E-Arsip Madujati
- 5) Inovasi 097 Standar Pelayanan
- 6) Inovasi Halo Madujati
- 7) Inovasi Pembuatan Buku Saku 100 Pertanyaan Terbaik Antara Penyuluh Dengan Wajib Pajak

- 8) Inovasi Pairing Fungsional Penyuluh Pajak di Seksi Pelayanan dengan Account Representative di Seksi Pengawasan KPP Madya Dua Jakarta Timur
- 9) Inovasi New Agenda Seksi Pelayanan KPP Madya Dua Jakarta Timur
- 10) Inovasi Whatsapp Tracking dan Konsultasi KPP Madya Dua Jakarta Timur
- 11) Inovasi Kartu Madu Jati
- 12) Inovasi Percepatan Pemindahbukuan (PBK) Wajib Pajak
- 13) Inovasi Bumaja (Buku Madu Jati): Top 15 Permohonan TPT
- 14) Inovasi Layanan Konsultasi
- 15) Inovasi CCTV pada Ruang Konsultasi
- 16) Inovasi Digital Banner
- 17) Inovasi Coffee Corner dan Perpustakaan Mini
- 18) Inovasi Manager on Duty
- 19) Inovasi Employee of The Month
- 20) Inovasi Layanan Mandiri
- 21) Inovasi Layanan Linktree
- 22) Inovasi Halo Madu Jati
- 23) Inovasi WhatsApp Blast
- 24) Inovasi Monila (Monitoring Layanan Adsis)
- 25) Inovasi Dashboard Madujati
- 26) Inovasi MAcDi (Morning Activity Madu Jati)
- 27) Inovasi Dashboard Madujati SDM
- 28) Inovasi SANDI (Sistem Pengarsipan Madu Jati)
- 29) Inovasi LDS (Long Distance Service)

1.3. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

1. Menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dengan memperhatikan informasi tematik APBN.
2. Penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024 yang telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
2. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan



dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3. Menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.
4. Menguraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.
5. Menguraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang dilaksanakan di tahun 2024.

- Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024 adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan yaitu: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Dalam menjalankan dan mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Dua Jakarta Timur memiliki visi “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Madya terbaik dan mitra Wajib Pajak yang mendukung terciptanya Kepatuhan Wajib Pajak dan tercapainya target penerimaan pajak”.

- Misi

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi, Misi Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2020 – 2024 adalah:

- merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

Atas dasar tersebut, Misi KPP Madya Dua Jakarta Timur yaitu “Memberikan pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif bagi seluruh Wajib Pajak terdaftar”.

- Tujuan

Tujuan utama Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur adalah untuk mendukung terealisasinya target penerimaan pajak dan tercapainya tax ratio Direktorat Jenderal Pajak.

Selain tujuan utama tersebut, beberapa tujuan Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua diantaranya mendukung indicator secara langsung melalui atas Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), mendukung pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif, memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder KPP Madya Dua Jakarta Timur. Untuk mendukung visi dan misi serta tujuan tersebut di atas, KPP Madya Dua Jakarta Timur membuat maklumat pelayanan sebagai bentuk komitmen kepada Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan terbaik. Maklumat Pelayanan KPP Madya Dua Jakarta Timur berbunyi: “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran tujuan dari tujuan yang telah ditetapkan, KPP Madya Dua Jakarta Timur memiliki sasaran terealisasinya target penerimaan yang telah ditetapkan dan selalu dapat memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak.

- Kebijakan

Beberapa kebijakan yang diterapkan di KPP Madya Dua pada Tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Meningkatkan pencapaian rencana penerimaan pajak;
3. Meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak;
4. Menyediakan informasi perpajakan yang terbaru dan teraktual;
5. Melaksanakan penancangan ZI WBBM untuk tahun 2025
6. Melaksanakan penancangan Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) untuk tahun 2024; serta
7. Meningkatkan fasilitas publik, dan fasilitas pelayanan.

- Program

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dicanangkan program-program yang harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana di KPP Madya Dua Jakarta Timur, diantaranya:

1. Penambahan akses pintu masuk untuk penyandang disabilitas
2. Penambahan fasilitas kaca mata baca pada area TPT;
3. Penambahan ruang bermain anak pada area TPT;
4. Penambahan rak-rak buku bacaan pada TPT;
2. Pembenahan kearsipan berkas;
3. Percepatan penyelesaian pelayanan;
4. Penyuluhan mengenai peraturan-peraturan terbaru kepada Wajib Pajak secara daring melalui media sosial KPP Madya Dua Jakarta Timur;
5. Penyuluhan mengenai peraturan-peraturan terbaru kepada Wajib Pajak secara tatap muka;
6. Pelaksanaan Tax Gathering Bersama Wajib Pajak;
7. Pengawasan administrasi perpajakan; dan
8. Peningkatan protokol kesehatan;

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KPP MADYA DUA JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%



6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam bab ini terdiri dari dua bagian yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Organisasi setiap pernyataan sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Sedangkan realisasi anggaran adalah uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi merupakan pernyataan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI KPP MADYA DUA JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	VC	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	<i>Stakeholder Perspective</i>						30,00%	99,32
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,32
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	98,31	Max	P/L	19,00%	42,22%	98,31
	<i>Customer Perspective</i>							103,85
	20,00%							
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,37
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,04
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	117,41%	Max	P/L	19,00%	42,22%	117,41
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,32
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Penujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,32%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,32
	<i>Internal Process Perspective</i>							117,25
	25,00%							
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,66
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,31%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,31
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,92
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,62%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,62
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,15%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,15
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69

7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	117,74%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>								116,49
25,00%								
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,97
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtinalan SDM	100,00	117,41	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,41
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,77	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	96,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,69
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,00

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	22.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	19.43%	34.26%	34.26%	55.93%	55.93%	100.06%	100.06%
Capaian	88.32%	68.52%	68.52%	74.57%	74.57%	100.06%	100.06%

sumber : Aplikasi Portal DJP, Aplikasi Mandor DJP, SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

- Deskripsi sasaran strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan .
- Definisi IKU
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).
Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan : Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan total tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **100.06%** yaitu Rp Rp8,075,559,258,883

- Analisis terkait capaian IKU

Dengan jumlah wajib Pajak Strategis pada tahun 2024 sebesar 1300 (termasuk Wajib Pajak Cabang) KPP Madya Dua Jakarta Timur memiliki prioritas pengawasan terhadap Wajib Pajak yang difokuskan kepada Wajib Pajak dengan NPWP Pusat 1112 Wajib Pajak. Didominasi oleh sektor-sektor usaha sebagai berikut : Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Jasa Profesional, Ilmiah dan teknis, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Real Estat, Kegiatan Jasa Lainnya, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak melampaui target saat ini, antara lain :

- 1) Kondisi ekonomi domestik yang terjaga;
- 2) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 3) Melakukan kegiatan Pengawasan PPM dan PKM secara berkala;
- 4) Optimalisasi PKM melalui WRA ;
- 5) Komunikasi dengan wajib pajak yang kooperatif

Kendala yang dihadapi :

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

- 1) Ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat konflik geopolitik dan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter. Volatilitas harga komoditas yang muncul di tengah ketidakpastian itu berpotensi memperlambat laju penerimaan pajak.
- 2) Terdapat kenaikan restitusi yang sangat signifikan mencapai 285% dibanding tahun lalu, dengan nilai kenaikannya sekitar Rp 39.000.000.000
- 3) Kegiatan penggalian potensi serta bahan baku PKM belum sesuai harapan
- 4) Penurunan setoran PPh Pasal 25 sektor komoditas batubara dan perdagangan yang merupakan sektor dominan penentu penerimaan KPP Madya Jakarta Timur serta tidak adanya sektor lain yg dapat menggantikan penurunan penerimaan dari sektor komoditas ini.
- 5) Tingginya tingkat pengembalian dan restitusi pajak

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- 1) Melakukan Peningkatan Pengawasan Pembayaran Pajak baik PPM maupun PKM melalui WRA
- 2) Optimalisasi PKM melalui WRA
- 3) Melakukan komunikasi dengan WP dalam bentuk himbuan/konseling dan permintaan informasi terkait kewajiban perpajakan WP
- 4) Menindaklanjuti data pemicu dan data perpajakan lainnya melalui penerbitan Laporan Hasil Penelitian (LHPt), Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau SP2DK dan LHP2D
- 5) Pengoptimalan penerimaan melalui manajemen pengelolaan pengembalian dan restitusi pajak

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
- 2) Melakukan pengawasan **Evaluasi Pemanfaatan Data** melalui SP2DK, Data Pemicu dan CTA
 - SP2DK

No.	Unit Kerja	Jumlah								
		WP	SP2DK	SP2DK belum LHP2DK	LHP2DK	Keputusan LHP2DK				
						Selesai	Usulan Pemeriksaan	Usul Bukper	Dalam Pengawasan	TA
1.	Seksi Pengawasan I	132	224	15	209	8	13	0	188	0
2.	Seksi Pengawasan II	145	347	16	331	39	22	0	270	0
3.	Seksi Pengawasan III	132	252	34	218	3	0	0	215	0
4.	Seksi Pengawasan IV	89	139	4	135	3	5	0	127	0
5.	Seksi Pengawasan V	145	261	46	215	3	25	0	187	0
6.	Seksi Pengawasan VI	106	219	7	212	0	8	1	203	0
Jumlah		749	1.442	122	1.320	56	73	1	1.190	0

No.	Unit Kerja	Nilai										
		Estimasi Potensi awal belum LHP2DK	Estimasi Potensi awal sudah LHP2DK	Perubahan	Estimasi Potensi Akhir LHP2DK	Estimasi Potensi Akhir LHP2DK				Realisasi Dalam Pengawasan		
						Selesai	Usulan Pemeriksaan	Usul Bukper	Dalam Pengawasan	Realisasi	Saldo Dalam Pengawasan	
1.	Seksi Pengawasan I	0	4.670.879.396	51.876.888.903	518.360.109	52.395.249.012	0	11.249.589.650	0	41.145.659.362	40.720.178.834	425.480.528
2.	Seksi Pengawasan II	0	1.092.069.912	61.104.286.303	5.500.435.282	66.604.721.585	0	17.301.843.053	0	49.302.878.532	57.073.607.406	-7.770.728.874
3.	Seksi Pengawasan III	0	8.588.067.071	46.298.725.089	10.581.260.128	56.879.985.217	0	0	0	56.879.985.217	55.249.577.095	1.630.408.122
4.	Seksi Pengawasan IV	0	607.355.984	49.273.967.371	40.213.536.083	89.487.503.454	0	57.163.785.713	0	32.323.717.741	33.584.207.252	-1.260.489.511
5.	Seksi Pengawasan V	0	5.046.580.657	61.068.382.378	15.439.356.282	76.507.738.660	0	23.064.424.285	0	53.443.314.375	58.535.553.368	-5.092.238.993
6.	Seksi Pengawasan VI	0	3.124.771.509	36.910.960.711	6.634.699.248	43.545.659.959	0	2.263.113.333	1.425.166.055	39.857.380.571	39.395.867.875	461.512.696
Jumlah		0	23.129.724.529	306.533.210.755	78.887.647.132	385.420.857.887	0	111.042.756.034	1.425.166.055	272.952.935.798	284.558.991.830	-11.606.056.032

sumber Rekapitulasi SP2DK pada aplikasi Approweb pada 18 Januari 2025

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

SP2DK yang diterbitkan sepanjang tahun 2024 sebanyak 1.442 dengan nilai estimasi potensi awal belum LHP2DK sebesar 23.129.724.529 dan telah ditindaklanjuti menjadi LHP2DK sebanyak 56 LHP2DK dengan status Selesai, 73 LHP2DK Usul Pemeriksaan dan 1190 LHP2DK Dalam Pengawasan dengan nilai realisasi Dalam Pengawasan sebesar 284.558.991.830.

- Data Pemicu

No.	Unit Kerja	Belum Ditindaklanjuti		Ditindaklanjuti		Ditindaklanjuti Wajib Pajak		Total	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1.	+ Seksi Pengawasan I	10	7.951.854.376	44	18.299.656.597	21	4.156.778.318	75	30.408.289.291
2.	+ Seksi Pengawasan II	18	547.300.022	108	14.511.195.479	32	174.701.263.414	158	189.759.758.915
3.	+ Seksi Pengawasan III	5	2.211.808.519	53	16.922.548.646	20	3.379.929.649	78	22.514.286.814
4.	+ Seksi Pengawasan IV	20	2.341.624.357	42	5.238.974.029	26	4.931.305.508	88	12.511.903.894
5.	+ Seksi Pengawasan V	11	2.613.727.364	66	39.872.159.730	43	10.588.969.491	120	53.074.856.585
6.	+ Seksi Pengawasan VI	9	131.599.071	29	7.535.790.781	10	607.036.701	48	8.274.426.553
+ Jumlah		73	15.797.913.709	342	102.380.325.262	152	198.365.283.081	567	316.543.522.052

Sumber data Data Pemicu pada Aplikasi Approweb pada 18 Januari 2025

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

Jumlah Data Pemicu yang diterima adalah sebanyak 567 data. Atas Data Pemicu dengan nilai total Rp316.543.522.052 telah ditindaklanjuti sebanyak 494 data (87.12%) dengan nilai data sebesar Rp 300.745.608.343 dan data pemicu yang belum ditindaklanjuti sebanyak 73 data (12.88%) dengan nilai Rp15.797.913.709.

- Data CTA

No.	Unit Kerja	Hasil Analisis CTA			Tindak Lanjut			Potensi Akhir LHP2DK				Realisasi
		Jumlah WP	Jumlah Data	Nilai	Jumlah WP	Jumlah Data	Potensi Awal	Usul Pemeriksaan	Usul Bukti Permulaan	SP2DK Selesai	Dalam Pengawasan	
1.	Seksi Pengawasan I	15	24	229.572.597.171	15	24	118.176.484.552	80.621.599.618	0	0	1.217.285.109	1.217.285.581
2.	Seksi Pengawasan II	6	10	31.158.281.119	6	10	38.194.154.518	32.758.435.481	0	0	0	0
3.	Seksi Pengawasan III	2	4	7.589.578.647	2	4	7.642.670.220	2.489.376.211	0	0	0	0
4.	Seksi Pengawasan IV	4	4	55.955.751.600	4	4	12.561.687.552	11.228.157.845	1.332.822.330	0	0	0
5.	Seksi Pengawasan V	10	17	90.243.414.173	9	16	91.707.396.895	794.854.439	0	0	972.429.153	1.017.456.753
6.	Seksi Pengawasan VI	1	1	3.881.060.277	1	1	3.868.203.358	0	0	0	406.600.000	406.685.408
Jumlah		38	60	418.400.682.987	37	59	272.150.597.095	127.892.423.594	1.332.822.330	0	2.596.314.262	2.641.427.742

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	-	85,62%	114,18%	103,22%	100,06%

sumber : Aplikasi Portal DJP, Aplikasi Mandor DJP, SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2024 penerimaan tetap terjaga didorong dengan terus melakukan kegiatan pengawasan atas PKM, pengoptimalisasi PKM melalui WRA serta pengoptimalan penerimaan melalui manajemen pengelolaan pengembalian dan restitusi pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	-	100%	100,06%

Terlampauinya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target dalam Renja DJP dan Renstra DJP sebesar 100,06%.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Melakukan pengawasan PPM dan PKM melalui kegiatan SP2DK, Visit dan Konseling
- Melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak guna manajemen pengembalian dan restitus pajak
- Melakukan optimalisasi penerimaan terhadap Wajib Pajak dengan status cabang yang baru masuk per januari 2025
- Melakukan tindaklanjut atas DPP SP2DK, Konseling, dan percepatan penerbitan LHP2DK
- Melakukan dinamisasi PPH 25

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98.17%	94.88%	94.88%	99.07%	99.07%	98.31%	98.31%
Capaian	98.17%	94.88%	94.88%	99.07%	99.07%	98.31%	98.31%

sumber : Aplikasi Portal DJP, Aplikasi Mandor DJP, SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), Aplikasi Rencana Penerimaan

- Deskripsi sasaran strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
- Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deskripsi

2. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara



manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

3. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing."

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$.

- Realisasi IKU

Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai sebesar 98.31% dari target 100%.

- Analisis terkait capaian IKU

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas belum memenuhi target, hal tersebut dipengaruhi oleh:

- 1) Wajib Pajak Grup yang bergerak di bidang kelapa sawit banyak melakukan transaksi ke kawasan berikat, yang secara tidak langsung berpengaruh pada penerimaan pajak KPP Madya Dua Jakarta Timur;

- 2) Berkurangnya bahan baku utama industri baja dari luar negeri akibat terjadinya perang di Rusia-Ukraina dan di Timur Tengah yang mengakibatkan penurunan penerimaan PPN Import dan Pasal 22 Import sebagai salah satu penopang penerimaan KPP Madya Dua Jakarta Timur.
 - 3) Keadaan politik ekonomi yang mengalami gejolak sehingga menimbulkan kendala dalam mencapai target penerimaan;
 - 4) Pertumbuhan ekonomi dan kegiatan usaha yang melambat akibat pelaku pasar domestik yang melakukan tindakan "wait and see" arah kebijakan dan pergantian pimpinan nasional dan pimpinan daerah se-Indonesia.
- Kendala yang dihadapi :
IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas belum memenuhi target, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
 - 1) Pertumbuhan dan pencapaian penerimaan pajak Tahun 2024 yang menurun dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan Tahun 2023
 - 2) Ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat konflik geopolitik dan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter. Volatilitas harga komoditas yang muncul di tengah ketidakpastian itu berpotensi memperlambat laju penerimaan pajak
 - 3) Penurunan penerimaan pajak pada salah satu sektor dominan

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- 1) Melakukan Peningkatan Pengawasan Pembayaran Pajak baik PPM Maupun PKM melalui WRA
- 2) Meningkatkan pengawasan terhadap setoran rutin, terutama kepada Wajib Pajak yang termasuk sektor dominan.
- 3) Melakukan upaya persuasif/ komunikasi kepada Wajib Pajak terkait pembayaran rutin melalui Account Representative.
- 4) Membuat rencana proyeksi/prognosa setiap bulan, triwulan dan satu tahun
- 5) Mengawasi pembayaran masa dan merealisasikan pembayaran atas kegiatan penelitian kepatuhan material Wajib Pajak

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	117,50%	112,60%	105,54%	98,31%

sumber : Aplikasi Portal DJP, Aplikasi Mandor DJP, SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), Aplikasi Rencana Penerimaan

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan 4 tahun terakhir, dikarenakan beberapa hal seperti : ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat konflik geopolitik dan berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter. Volatilitas harga komoditas yang muncul di tengah ketidakpastian itu berpotensi memperlambat laju penerimaan pajak. Penurunan harga komoditas (batu bara) dari harga USD305,21 di awal tahun 2023 menjadi USD125,85 di awal tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100%	98,31%

Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai sebesar 98.31% dari target 100%.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Membuat rencana proyeksi/prognosa setiap bulan, triwulan dan satu tahun dengan lebih presisi memperhatikan kondisi ekonomi mikro dan makro
- Mengawasi pembayaran masa dan merealisasikan pembayaran atas kegiatan PnKM sesuai dengan proyeksi yang telah disusun
- Pembuatan Prognosa Penerimaan Pajak yang akurat
- Pengawasan optimal terhadap setoran pajak cabang yang baru masuk per januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	22.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	25.00%	34.63%	34.63%	57.53%	57.53%	100.04%	100.04%
Capaian	113.64%	69.26%	69.26%	76.71%	76.71%	100.04%	100.04%

sumber : Aplikasi Consolidated Report, Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi sasaran strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.
- Formula IKU
(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM : Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM) x 100%

- Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **100.04%**

- Analisis terkait capaian IKU
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berhasil melampaui target yang telah ditentukan, hal tersebut dipengaruhi oleh :
 - 1) Identifikasi yang tepat terkait wajib pajak dengan keterlambatan pembayaran
 - 2) Data yang bermanfaat sebagai pemicu Pembayaran Masa (PM)
 - 3) Pemanfaatan data dinamisasi untuk Pengawasan Pembayaran Masa secara efektif
 - 4) DPP tambahan yang efisien

- Kendala yang dihadapi :
Meskipun IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
 - 1) Beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau tidak menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu
 - 2) Wajib Pajak belum selesai membuat laporan keuangan dan kesulitan cash flow untuk melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan
 - 3) Wajib pajak beda tahun buku dan beberapa mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan
 - 4) Penurunan penerimaan pajak pada salah satu sektor dominan

- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala :
 - 1) Penyampaian himbauan untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo
 - 2) Mengirimkan Whatsapp Blast kepada seluruh Wajib Pajak terdaftar yang berisikan pengingat agar Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu
 - 3) Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh Masyarakat
 - 4) Mendatangi langsung tempat Wajib Pajak terdaftar untuk melakukan sosialisasi dan asistensi SPT Tahunan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	84,06%	112,84%	108,28%	100,04%

sumber : Aplikasi Consolidated Report, Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang ditentukan, meskipun tidak sebesar 2 tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pajak pada salah satu sektor dominan

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	100%	100,04%

Terlampauinya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,04%.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Pemanggilan WP dan komunikasi efektif kepada WP yang mempunyai kebiasaan lapor SPT terlambat untuk dilakukan konseling agar lapor SPT Tahunan tepat waktu
- Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan dengan penerbitan SP2DK dan/atau Surat Himbauan dan visit
- Mengusulkan pemeriksaan post audit
- Melakukan analisis komprehensif untuk menguji kepatuhan material sektor Batubara

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	19.01%	108.89%	108.89%	116.36%	116.36%	117.41%	117.41%
Capaian	31.68%	120.00%	120.00	120.00%	120.00%	117.41%	117.41%

sumber : Aplikasi Dashboard Kepatuhan, Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi sasaran strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- Definisi IKU
 - 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
 - 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 - 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 - 4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 - 5) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

- 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- 8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU :

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **117.41%**

- Analisis terkait capaian IKU

Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah melampaui target yang telah ditentukan, edukasi dan himbauan penyampaian SPT sebelum jatuh tempo telah dilaksanakan dengan baik, pengawasan kepatuhan WP Strategis dan WP Kewilayahan telah dilakukan secara maksimal dengan upaya-upaya yang gencar dilakukan oleh DJP sepanjang tahun 2022 untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

- Kendala yang dihadapi

Meskipun IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat terlampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

- 1) Masih terdapat Data Wajib Pajak yang tidak update (alamat, nomor telepon, dan alamat email) dengan kondisi WP, sehingga menyulitkan DJP dalam menjalankan strategi kepatuhan.
- 2) Adanya Wajib Pajak badan yg melakukan penundaan penyampaian SPT Tahunan dikarenakan Laporan Keuangan belum selesai dilakukan audit.

- 3) Terdapat Wajib Pajak yang mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan
 - 4) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak serta masyarakat tentang kewajiban perpajakannya
 - 5) Wajib Pajak besar sektoral tertentu penentu penerimaan mengalami penurunan kegiatan ekonomi akibat resesi
 - 6) Sulitnya menghubungi Wajib Pajak untuk melakukan himbauan yang antara lain disebabkan oleh pergantian pengurus, hanya ada virtual office serta wakil wajib pajak yang tidak berada di Indonesia
- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - 1) Penyampaian Himbauan SPT Tahunan sebelum Jatuh Tempo
 - 2) Whatsapp dan email untuk meningkatkan WP Lapor SPT Tahunan tepat waktu
 - 3) Identifikasi WP dengan History pelaporan terlambat
 - 4) Melakukan konseling dengan Wajib Pajak agar lapor pajak tahunan tepat waktu
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain
 - 1) Smoothing target SPT Tahunan dikarenakan terdapat beberapa Wajib Pajak yang berpotensi tidak meaporkan SPT Tahunan karna suatu sebab
 - 2) Melakukan Identifikasi WP dengan History pelaporan terlambat
 - 3) Penyampaian Himbauan SPT Tahunan sebelum Jatuh Tempo
 - 4) Whatsapp dan email untuk meningkatkan WP Lapor SPT Tahunan tepat waktu

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	100,09%	100%	100%	117,41%

sumber : Aplikasi Dashboard Kepatuhan, Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 4 tahun terakhir, Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi kooperatif dan meningkatnya kesadaran terkait penyampaian SPT Tahunan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100%	117,41%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Pemanggilan WP dan komunikasi efektif kepada WP yang mempunyai telat dalam pelaporan SPT untuk dilakukan konseling agar lapor SPT Tahunan tepat waktu.
- Mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk menyampaikan edukasi terkait pelaporan SPT Tahunan

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	14.00%	31.11%	31.11%	42.14%	42.14%	100.32%	100.32%
Capaian	56.00	62.22	62.22	56.19	56.19	100.32	100.32

sumber : Consolidated Report, Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi sasaran strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan

melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU
(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM x Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM) x 100%
- Realisasi IKU:
Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **100.32%**
- Analisis terkait capaian IKU
Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercapai sebesar 100.32% melampaui target yang telah ditentukan, hal tersebut dipengaruhi oleh koordinasi yang baik dengan wajib pajak membuat kepatuhan wajib pajak naik, potensi dari wajib pajak strategis berpengaruh terhadap kegiatan PKM.
- Kendala yang dihadapi :
Meskipun IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
 - 1) Wajib Pajak yang sedang melakukan upaya hukum
 - 2) Tempat usaha WP sesuai alamat terdaftar tidak ditemukan/pinda
 - 3) Nilai SKPKB/STP terbit tidak sebesar nilai potensi DSPP
 - 4) Wajib Pajak mengajukan upaya hukum atas produk hukum hasil pemeriksaan
 - 5) Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) mengalami penurunan kegiatan usaha, sehingga tidak mampu melunasi kewajiban
 - 6) Kualitas data yang diterima KPP belum secara optimal dapat menghasilkan potensi penerimaan pajak
 - 7) Saldo awal SP2DK Outstanding jauh lebih kecil daripada Tahun sebelumnya, sehingga pencairan di Triwulan I tidak besar
 - 8) Sebagian Wajib Pajak melakukan upaya hukum atas SKP yang diterbitkan
 - 9) Nilai SKPKB/STP terbit tidak sebesar nilai potensi LHP2DK/KKA
 - 10) Wajib Pajak mengajukan upaya hukum atas produk hukum hasil pemeriksaan

11) Adanya percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan di tahun 2024, sehingga FPP memprioritaskan untuk menyelesaikan SP2 yang terdampak percepatan tersebut. SP2 yang terdampak percepatan didominasi oleh pemeriksaan lebih bayar.

- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala :
 - 1) Melakukan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kepada Wajib Pajak, meliputi:
 - a. Menyampaikan Surat Paksa.
 - b. Konfirmasi tunggakan pajak via telepon
 - c. Konseling WP yang sudah menerima surat paksa
 - d. Pemblokiran Rekening Wajib Pajak
 - 2) Mengusulkan DSPP Wajib Pajak Strategis secara rutin setiap bulan dan melakukan adjustment DSP4 Kolaboratif per semester dengan menambahkan usulan adjustment analisis DSPP guna menambah bahan baku pemeriksaan
- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain dengan Melakukan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) kepada WP strategis, melakukan himbauan data matching

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120%	131,62%	59,50%	100,32%

sumber : Consolidated Report, Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, kegiatan pengawasan kepatuhan dilakukan kepada wajib pajak dengan penyampaian surat himbauan, konfirmasi terkait tunggakan pajak, pemblokiran rekening wajib pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	100%	100,32%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Pelaksanaan kegiatan bedah wajib pajak Strategis untuk menggali potensi dari kegiatan PKM
- Percepatan penyelesaian SP2DK dan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan.
- Menambah usulan DPP melalui DPP Mandatory.
- Kolaborasi dengan PPNS

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	42.18%	83.56%	83.56%	88.18%	88.18%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

sumber : Mandor-DJP

- Deskripsi sasaran strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan

intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$
- **Realisasi IKU**
 Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **88,80%**
- **Analisis terkait capaian IKU**
 IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan berhasil mencapai target dengan beberapa faktor pendukung diantaranya edukasi kepada wajib pajak terkait pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan proaktif melalui media sosial yaitu podcast, live instagram, hal terkait menjadi penunjang dalam keberhasilan IKU.
- **Kendala yang dihadapi**
 Meskipun IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat terlampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain
 - 1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak serta masyarakat tentang kewajiban perpajakannya
 - 2) Kurangnya pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak terkait media penyampaian edukasi dan penyuluhan
 - 3) Pengetahuan Wajib Pajak yang minim dalam memahami peraturan perpajakan yang bersifat dinamis
- **Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - 1) Melakukan upgrade sarana dan prasarana yang berkaitan dengan media penyuluhan bagi Wajib Pajak
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk menyampaikan edukasi perpajakan
 - 3) Melakukan Whatsapp Blast kepada Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan terbaru dan informasi perpajakan lainnya

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00%	88.80%

sumber : Mandor-DJP

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan IKU baru pada tahun 2023, pada Tahun 2024 realisasi IKU melampaui target yang telah ditentukan dan lebih baik dari Tahun 2023, hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak semakin tinggi terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	74%	88.80%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Melakukan penyuluhan secara tatap muka.
- 2) Melakukan penyuluhan secara daring dengan memanfaatkan media sosial KPP Madya Dua Jakarta Timur
- 3) Membuat video podcast dan Instagram Live untuk edukasi Wajib Pajak

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5.00%	10.00%	10.00%	5.00%	15.00%	85.00%	100.00%
Realisasi	7.23%	31.77%	31.77%	18.00%	18.00%	109.31%	109.31%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	128.60	109.31

sumber : laporan hasil survey

- Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut :

 1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
 2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
 3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survey

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **109.31%**

- **Analisis terkait capaian IKU**

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercapai sebesar 109,31% melampaui target yang telah ditentukan, Pelayanan sesuai SOP kepada wajib pajak dan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan dan penyuluhan terus dilakukan guna meningkatkan mutu pelayanan sehingga dapat memenuhi target yang telah dicapai.

- **Kendala yang dihadapi**

Meskipun IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan terlampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

 - 1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak serta masyarakat tentang kewajiban perpajakannya
 - 2) Kurangnya pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak terkait media penyampaian edukasi dan penyuluhan
 - 3) Kebingungan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang bersifat dinamis

- **Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - 1) Melakukan penyuluhan secara tatap muka
 - 2) Melakukan penyuluhan secara daring dengan memanfaatkan media sosial KPP Madya Dua Jakarta Timur
 - 3) Membuat video podcast untuk edukasi Wajib Pajak

- 4) Memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di TPT

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	79%	92,26%	81,65%	109,31%

sumber : laporan hasil survey

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan selama 2 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dengan melakukan edukasi kepada Wajib Pajak dari berbagai jenis media penyampaian dan memberitahukan jadwal pelaksanaan edukasi kepada Wajib Pajak melalui berbagai media sosial KPP mampu menambah kesadaran wajib pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	100%	109,31%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Senantiasa mempertahankan meberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Wajib Pajak tanpa terkecuali
- 2) Terus menerus melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak
- 3) Tetap menghimbau kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan pelayanan untuk mengisi survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan untuk mengetahui tingkat kepuasan Wajib Pajak sebagai bahan evaluasi

Persentase pengawasan pembayaran masa strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	N/A	119.22%	119.22%	108.86%	108.86%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	120.00	120.00	120.00	120.00	133.33	133.33

sumber : Aplikasi Mandor dan sumber lainnya

- Deskripsi sasaran strategis
Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak
- Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.
- Formula IKU
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis =

$$\begin{aligned} & (\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) + \\ & (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%) + \\ & (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \end{aligned}$$
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **120%**
- Analisis terkait capaian IKU
Capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis tercapai sebesar 120% melampaui target yang telah ditentukan, terkait wajib pajak bersedia memberikan konfirmasi dan pembayaran atas himbuan STP kepada tahun berjalan yang telah diberikan.

- Kendala yang dihadapi
Meskipun IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis terlampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain
 - 1) Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pengawasan PPM mengalami penurunan kegiatan usaha, sehingga tidak mampu melunasi kewajiban
 - 2) Kualitas data yang diterima KPP belum secara optimal dapat menghasilkan potensi penerimaan pajak.

- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - 1) Tindak lanjut atas semua data tahun berjalan dan penerbitan STP
 - 2) Penerbitan Surat Imbauan Peningkatan Angsuran Tahun Berjalan selain dafnom

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	-	84,06%	106,19%	106,19%	120%

sumber : Aplikasi Mandor dan sumber lainnya

Realisasi capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis selama 4 tahun terakhir terus mengalami kenaikan, Wajib Pajak kooperatif dan segera memberikan tanggapan setelah menerima STP serta angsuran tahun berjalan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	-	-	-	90%	120%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Tindak lanjut atas semua data tahun berjalan dan penerbitan STP
- 2) Penerbitan Surat Imbauan Peningkatan Angsuran Tahun Berjalan selain dafnom / tambahan

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10.00%	40.00%	40.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	120.00%	120.00%	90.00%	90.00%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

sumber : Mandor-DJP

- Deskripsi sasaran strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHpt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.
Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
 - A. Komponen Penelitian
 - B. Komponen Tindak Lanjut
 - A. Komponen Penelitian
Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHpt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHpt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHpt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHpt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.
 - B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE 09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan

- **Formula IKU**
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = $(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$
- **Realisasi IKU**
Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **120%**
- **Analisis terkait capaian IKU**
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis berhasil mencapai target dengan beberapa faktor koordinasi dengan wajib pajak atas penerbitan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, Memberikan konseling kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan bersama kepala seksi serta direktur dan komisararis Wajib Pajak.

- Kendala yang dihadapi
Meskipun IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis dapat terlampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain
 - 4) Adanya kesulitan dalam menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
 - 5) Beberapa Wajib Pajak tidak kunjung memberikan tanggapan setelah menerima (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) SP2DK

- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - 4) Penerbitan dan penyelesaian LHPT/SP2DK tepat waktu
 - 5) Menindaklanjuti data dengan usul pemeriksaan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	-	118,07%	169,20%	169,20%	120%

sumber : Mandor-DJP

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis selama 4 tahun terakhir terus melampaui target, hal ini membuktikan bahwa pemberian keterangan data oleh wajib pajak dan penetapan DPP terhadap wajib pajak berjalan optimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	-	-	-	100%	120%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 4) Melakukan kunjungan ke Alamat wajib pajak dan memberikan komunikasi intensif terhadap wajib pajak
- 5) Tindak lanjut dengan usul Pemeriksaan

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	117.78%	117.78%	117.24%	117.24%	119.62%	119.62%
Capaian	N/A	117.78	117.78	117.24	117.24	119.62	119.62

sumber : Aplikasi Mandor, Approweb, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

- Deskripsi sasaran strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, dan Data Matching adalah Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative.
- Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **119.62%**
- Analisis terkait capaian IKU
Capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tercapai sebesar 119,62% melampaui target yang telah ditentukan, optimalisasi data dengan cara update penurunan data, tindak lanjut tepat waktu baik melalui DPP Mandatory maupun WRA menjadi penunjang tercapainya iku.

- Kendala yang dihadapi
Meskipun IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat terlampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain Data pemicu selain tahun berjalan jumlah dan nilainya kurang signifikan
- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - 1) Menindaklanjuti data terkait data pemicu untuk kemudian diusulkan melalui DPP mandatory, kegiatan WRA
 - 2) Meneliti dan memanfaatkan seluruh data pada SP2DK

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,62%

sumber : Aplikasi Mandor, Approweb, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan

Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan IKU baru pada tahun 2023 dan 2024, dengan target yang harus dicapai sebesar 100% dapat dipenuhi sampai 119,62% pada tahun 2024. Data pemicu dapat diselesaikan dengan baik sehingga pada akhir tahun tercapai dengan baik.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	100%	119,62%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Melakukan update penurunan data
- 2) Segera melakukan tindak lanjut, baik melalui DPP Mandatory, WRA

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	84.12%	97.44%	97.44%	108.23%	108.23%	117.15%	117.15%
Capaian	84.12	97.44	97.44	108.23	108.23	117.15	117.15

sumber : Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP, Nota Dinas Pengiriman DSPP, BA pembahasan DSPP, Mandor DJP, Aplikasi Portal P2, dan Dashboard Rapor Kinerja

- Deskripsi sasaran strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
- Formula IKU
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **117,15%**
- Analisis terkait capaian IKU
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu berhasil mencapai target, efektivitas dalam Melakukan monitoring, evaluasi, dengan tools raport, dan meminimalisir deviasi selama tahun 2024 berjalan dengan baik, selain itu adjustment DSP4 Kolaboratif per semester dengan menambahkan usulan adjustment analisis DSPP serta

Melakukan koordinasi terkait bahan baku pemeriksaan melalui Komite Kepatuhan berperan penting dalam pencapaian realisasi.

- Kendala yang dihadapi
Meskipun IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat terlampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain
 - 1) Kurangnya bahan baku pemeriksaan
 - 2) Nilai potensi bahan baku yang diusulkan masih jauh dari target.
 - 3) Dari 3 komponen yang diukur, untuk aspek 1 telah mendapatkan nilai maksimal (120%) adapun yang kurang maksimal terdapat di Aspek 3 yaitu Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (40,50%)
 - 4) Nilai potensi bahan baku (Data Pmeicu / Penguji) dari rekomendasi yang tidak akurat

- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - 1) Melakukan penelitian mandiri
 - 2) Mengadakan rapat pembahasan DSP4 per semester
 - 3) Melakukan adjustment DSP4 Kolaboratif per semester dengan
 - 4) Menambahkan usulan adjustment analisis DSPP guna menambah bahan baku pemeriksaan"
 - 5) Mengolah data Wajib Pajak yang belum melaporkan SPTnya dari aplikasi mandor DJP untuk ditindaklanjuti dengan WA blast oleh seksi terkait;
 - 6) Berkoordinasi dengan seksi terkait, Kanwil DJP Jakarta Timur dan pimpinan tentang progres Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT untuk diupdate datanya telah lapor atau masih terdapat kendala.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	117.15%

sumber : Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP, Nota Dinas Pengiriman DSPP, BA pembahasan DSPP, Mandor DJP, Aplikasi Portal P2, dan Dashboard Rapor Kinerja

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan secara optimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	100%	117,15%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Melakukan monitoring, evaluasi, dengan tools raport, dan meminimalisir deviasi selama tahun 2025
- 2) Melakukan penelitian mandiri
- 3) Melakukan adjustment DSP4 Kolaboratif per semester dengan menambahkan usulan adjustment analisis DSPP guna menambah bahan baku pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105.90%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	105.90	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

sumber : SIDJP, aplikasi Portal P2, Laporan Penilaian, dan Menu monitoring aplikasi appraisal

- Deskripsi sasaran strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) +
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **120%**
- Analisis terkait capaian IKU
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tercapai sebesar 120% melampaui target yang telah ditentukan, prosedur pemeriksaan telah sesuai SOP Organisasi sehingga dapat berjalan dengan lancar, optimalisasi analisis DSPP secara rutin membantu target untuk tercapai.
- Kendala yang dihadapi
Meskipun IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dapat terlampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, seperti
Keterbatasan SDM penilai di KPP sehingga penyelesaian penilaian terhambat, Tunggakan SP2 di lingkungan KPP Madya Dua Jakarta Timur didominasi oleh tunggakan pemeriksaan lebih bayar, sehingga FPP memprioritaskan untuk menyelesaikan tunggakan pemeriksaan lebih bayar terlebih dahulu mengingat pemeriksaan lebih bayar memiliki jatuh tempo yang lebih singkat, terdapat beberapa Wajib Pajak yang mengajukan upaya hukum seperti keberatan dan banding atas SKPKB/STP yang terbit dari hasil pemeriksaan, Terdapat beberapa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi atas STP yang terbit dari hasil pemeriksaan, Terdapat beberapa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur atas SKPKB yang terbit dari hasil pemeriksaan, Terdapat beberapa Wajib Pajak yang kegiatan usahanya sudah tidak beroperasi lagi sehingga Wajib Pajak tersebut kesulitan melunasi SKPKB/STP yang terbit dari hasil pemeriksaan.
- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - 1) Penambahan jumlah SDM penilai di KPP
 - 2) Melakukan Prosedur pemeriksaan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan
 - 3) Mengusulkan DSPP Wajib Pajak Strategis secara rutin setiap bulan dan melakukan adjustment DSP4 Kolaboratif per semester dengan

menambahkan usulan adjustment analisis DSPP guna menambah bahan baku pemeriksaan

4) Penyelesaian tunggakan LHP dan SP2 secara tepat waktu

No.	Jenis Pemeriksaan	SP2 Terbit Jan-Des 2024	LHP Selesai Jan-Des 2024			Sisa Tunggakan s.d. 2025
			Jumlah LHP Selesai	Bobot Nilai Konversi	Total Nilai LHP Selesai	
1.	Pemsus	149	122	1	122	111
2.	Rutin LB All Taxes	114	113	1	113	106
3.	Rutin LB PPN	170	158	0,45	71,1	131
4.	Tujuan Lain	14	14	0,25	3,5	0
5.	Rutin Likuidasi	4	2	0,25	0,5	4
Total		451	409		310,10	352
Target Nilai Konversi LHP Selesai 2024						230

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain

UP2		Target Pencairan Kegiatan Pemeriksaan (Rp)	Realisasi Pencairan Kegiatan Pemeriksaan (Rp)	Capaian (%)
097	KPP Madya Dua Jakarta Timur	155.637.564.000	156.044.338.217	100,26%

Penyelesaian Pencairan kegiatan pemeriksaan tepat waktu dengan memperhatikan SOP yang ada

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	120%

sumber : SIDJP, aplikasi Portal P2, Laporan Penilaian, dan Menu monitoring aplikasi appraisal

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan iku baru pada tahun 2024, realisasi iku yaitu 120% melampaui target yang telah ditetapkan, dengan sumber daya yang terbatas prioritas penyelesaian penilaian dapat terselesaikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	100%	117,41%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Melakukan Prosedur pemeriksaan
- 2) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan terutama pemeriksaan khusus
- 3) Mengusulkan DSPP Wajib Pajak Strategis secara rutin setiap bulan dan melakukan adjustment DSP4 Kolaboratif per semester dengan menambahkan usulan adjustment analisis DSPP guna menambah bahan baku pemeriksaan

Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%
Realisasi	28.00%	56.71%	56.71%	84.98%	84.98%	117.74%	117.74%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	156.99	156.99

sumber : SIDJP, Portal Kinerja Penagihan

- Deskripsi sasaran strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan

dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%)

- **Formula IKU**
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)
- **Realisasi IKU**
Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **117.74%**
- **Analisis terkait capaian IKU**
Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan tercapai sebesar 117,74% melampaui target yang telah ditentukan, kegiatan persuasif kepada wajib pajak serta Tindakan penagihan aktif mempermudah proses kegiatan penagihan sesuai target.
- **Kendala yang dihadapi**
Meskipun IKU Tingkat efektivitas penagihan dapat terlampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
 - 1) Masih terdapat Wajib Pajak yang merasa tidak menerima STP
 - 2) Proses jawaban dari Bank terkait tindakan pemblokiran memerlukan waktu cukup lama
- **Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - 1) Sistem jemput bola dengan mengantarkan surat pemblokiran langsung ke Bank terkait dan berkoordinasi dengan Petugas Bank terkait pemblokiran secara berkala.
 - 2) Berkoordinasi kepada seksi pengawasan yang menerbitkan dan mengirimkan STP untuk mengirim ulang kepada Wajib Pajak tersebut.
 - 3) Outbound call Wajib Pajak
 - 4) Menyelesaikan Tindakan penagihan seperti penyampaian Surat Teguran (2885), Surat Paksa (1690), Blokir (57) tepat waktu dengan memperhatikan efektivitas penagihan atas output yang dicapai,

No	Jenis Tindakan Penagihan	Poin Tindakan			Tingkat Efektivitas Penagihan		
		Target	Realisasi	(%) Realisasi	Max 120%	Pembobotan	(%) Realisasi IKU
1	Surat Teguran	1605	2885	179.75%	120%	19.00%	22.8%
2	Surat Paksa	642	1690	263.24%	120%	29.00%	34.8%
3	Sita/SPMP	41	26	63.41%	63.41%	8.00%	5.1%
4	Blokir	25	57	228.00%	120%	28.00%	33.6%

5	Penjualan Barang Sitaan	8	14	175.00%	120%	16.00%	19.2%
Total							115,47%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	107,66%	108,18%	108,18%	117.74%

sumber : SIDJP, Portal Kinerja Penagihan

IKU Tingkat efektivitas penagihan selama 4 tahun terakhir terus mengalami kenaikan, faktor pendukung seperti system pro aktif petugas penagihan dengan wajib pajak serta koordinasi dengan Bank terkait wajib pajak yang terdaftar sebagai nasabah terkait mempermudah kegiatan penagihan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	100%	117,74%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Sistem jemput bola dengan mengantarkan surat pemblokiran langsung ke Bank tempat wajib pajak/nasabah terdaftar dan berkoordinasi secara berkala
- Berkoordinasi kepada seksi pengawasan yang menerbitkan dan mengirimkan STP untuk mengirim ulang kepada wajib pajak tersebut
- Menerbitkan Surat Teguran atas STP/SKP yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak.
- Menghubungi Wajib Pajak secara persuasif.
- Melaksanakan tindakan penagihan aktif

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
Capaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

sumber : Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Deskripsi sasaran strategis :

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**
Realisasi IKU penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **100%**
- **Analisis terkait capaian IKU**
Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai target yang telah ditentukan, data terhadap usulan bukti pemeriksaan dapat terselesaikan dan tidak ada indikasi tindak pidana pada WP yang diawasi.
- **Kendala yang dihadapi**
Meskipun IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat terlampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain
 1. Tidak ada usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
 2. Tidak ada indikasi tindak pidana

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

sumber : Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru pada tahun 2024 dan tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditentukan

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%	100%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Melakukan analisa mandiri dan pemanfaatan data

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	60.00%	60.00%	60.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

sumber : Aplikasi Alket SIDJP Nine, Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR), Laporan Monitoring Kegiatan Pengamatan"

- Deskripsi sasaran strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan produksi alat keterangan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.
- Formula IKU
(*Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan*
$$\frac{+ \text{Produksi Alat Keterangan}}{2} \times 100\%$$
)
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan produksi alat keterangan tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **120%**

- Analisis terkait capaian IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan produksi alat keterangan berhasil mencapai target, hal ini tidak lepas dari kinerja pegawai dalam memonitoring dan evaluasi kegiatan laporan pengamatan serta melakukan pengamatan lapangan di lokasi Wajib Pajak, profiling wajib pajak juga membantu dalam realisasi IKU.
 - Kendala yang dihadapi
Meskipun IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan produksi alat keterangan dapat terlampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024, seperti keterbatasan akan informasi terkait Wajib Pajak
 - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - 1) Memanfaatkan data selama tahun berjalan untuk ditindaklanjuti sebagai alket
 - 2) Profiling Wajib Pajak
 - 3) Pengamatan lapangan ke Lokasi alamat Wajib Pajak secara langsung
- 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan produksi alat keterangan	-	-	-	120%	120%

sumber : Aplikasi Alket SIDJP Nine, Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR), Laporan Monitoring Kegiatan Pengamatan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan produksi alat keterangan stabil dengan realisasi pada Tahun 2023, meskipun terdapat daftar wajib pajak baru yang sulit dalam akses data informasi, sehingga data yang ditampilkan perlu diolah lebih detail.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan produksi alat keterangan	-	-	-	100%	120%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Pembuatan Laporan Produksi Alket
- 2) Penyelesaian Laporan Pengamatan Melakukan penelitian mandiri
- 3) Melakukan pengamatan lapangan di lokasi Wajib Pajak dan membuat laporan pengamatan

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120.00	120.00	120.00	120	120	117	117
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	117.41	117.41

sumber : Komponen 1: Rekapitulasi laporan hasil Assessment Center dan Laporan Individual Assessment Center, hasil uji kompetensi teknis dan laporan realisasi pengembangan kompetensi, Laporan pelaksanaan pelatihan pegawai/IHT, studiA DJP, SIKKA dan Kemenkeu Learning Center. Komponen 2: Hasil Feedback, Laporan Kegiatan

- Deskripsi sasaran strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
Komponen 1 Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu: 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur

berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM). Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal

- Formula IKU
Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **117%**
- Analisis terkait capaian IKU
Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tercapai 117% maksimal melampaui target yang telah ditentukan. Evaluasi hasil assessment center dan hasil uji kompetensi rutin, pemberian motivasi kepada pegawai secara rutin menjadi tolak ukur keberhasilan target kebintalan SDM
- Kendala yang dihadapi
Tidak terdapat kendala pada IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sehingga target dapat terlampaui
- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Langkah yang ditempuh dalam mengantisipasi kendala adalah Evaluasi hasil assessment center dan hasil uji kompetensi dan pemberian motivasi kepada pegawai.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117%

sumber : Komponen 1: Rekapitulasi laporan hasil Assessment Center dan Laporan Individual Assessment Center, hasil uji kompetensi teknis dan laporan realisasi pengembangan kompetensi, Laporan pelaksanaan pelatihan pegawai/IHT, studiA DJP, SIKKA dan Kemenkeu Learning Center. Komponen 2: Hasil Feedback, Laporan Kegiatan

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 117 % dari target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	100%	117%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Melakukan pembinaan mental pegawai pada tahun 2025
- 2) Evaluasi dan monitoring hasil assessment center tiap triwulan pada tahun 2025

Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85	85	-	85
Realisasi	-	-	-	100	100	100	96.77
Capaian	N/A	N/A	N/A	118%	118%	N/A	113.85%

sumber : Hasil survei penilaian integritas

- Deskripsi sasaran strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **96.77%**
- Analisis terkait capaian IKU
Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tercapai pada angka 96,77% pada Tahun 2024. Pengisian oleh responden Survei Penilaian Integritas Unit menunjukkan bahwa hasil survey cukup baik, melewati target yang ditetapkan.
- Kendala yang dihadapi
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dapat terlampaui dengan baik tanpa ada kendala

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	95,95%	92,74%	92,74%	96,77%

sumber : Hasil survei penilaian integritas

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan hal ini didukung dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi kepada stakeholder dengan profesionalisme dan menjunjung tinggi integritas.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85%	96,77%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

1. Mengawasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) pada tahun 2025

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	45.50	44.33	44.33	89	89	96	96.93
Capaian	120.00	94.32	94.32	120.00	120.00	106.67	107.70

sumber : Laporan pelaksanaan program budaya kinerja, Nota Dinas penyampaian indeks kualitas pengelolaan kinerja, Surat Undangan, Daftar Hadir, Foto Kegiatan, Risalah DKO, Matriks Tindak Lanjut, Laporan Pemantauan Triwulanan, Umpan Balik, Penjelasan Progres IKU, Formulir Mitigasi Risiko dan Laporan Pemantauan Triwulanan Manajemen Risiko, Screenshot Aplikasi PERISKOP, Nota Dinas Penyampaian Piagam MR dan Dokumen Pendukung, Undangan Rapat, Daftar Hadir, Nota Dinas/Screenshot aplikasi PERISKOP atas penyampaian Laporan Pemantauan Triwulanan MR, LPKR

- Deskripsi sasaran strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

- **Formula IKU**
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
- **Realisasi IKU**
Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **96.93%**
- **Analisis terkait capaian IKU**
Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tercapai pada angka 96,93% pada Tahun 2024 melewati target yang telah ditentukan. Faktor pendukungnya dengan melaksanakan implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai ketentuan.
- **Kendala yang dihadapi :**
Manajemen Kinerja organisasi cukup baik dan belum terdapat kendala terkait IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	100%	100%	100%	96,93%

sumber : Laporan pelaksanaan program budaya kinerja, Nota Dinas penyampaian indeks kualitas pengelolaan kinerja, Surat Undangan, Daftar Hadir, Foto Kegiatan, Risalah DKO, Matriks Tindak Lanjut, Laporan Pemantauan Triwulanan, Umpan Balik, Penjelasan Progres IKU, Formulir Mitigasi Risiko dan Laporan Pemantauan Triwulanan Manajemen Risiko, Screenshot Aplikasi PERISKOP, Nota Dinas Penyampaian Piagam MR dan Dokumen Pendukung, Undangan Rapat, Daftar Hadir, Nota Dinas/Screenshot aplikasi PERISKOP atas penyampaian Laporan Pemantauan Triwulanan MR, LPKR

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun ini dibandingkan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini berkaitan dengan pergantian IKU pada Tahun 2024 dengan target sebesar 90% dan realisasi pada akhir Tahun 2024 sebesar 96,93%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	90%	96.93

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- Melaksanakan dan mengawasi implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai ketentuan

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja KPP Madya Dua Jakarta Timur di akhir tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120.00	120.00	120.00	100	120	120	120
Capaian	120.00	120.00	120.00	100.00	120.00	120.00	120.00

sumber : Laporan realisasi anggaran Kementerian Keuangan, SMART-DJA, IKPA DJPB, OMSPAN

- Deskripsi sasaran strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
- Definisi IKU
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
- Formula IKU
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tercapai melampaui target yang telah ditentukan sebesar **120%** dari target utama 100%
- Analisis terkait capaian IKU
Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tercapai pada angka maksimal yaitu 120% pada Tahun 2024 melewati target yang telah ditentukan. Capaian IKU pengelolaan keuangan yang akuntabel sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah maksimal dengan capaian IKPA sebesar 99,93 dan capaian SMART sebesar 100 sehingga nilai yang diperoleh sebesar 99,97 dari target sebesar 91. Dengan demikian setelah indeksasi nilai yang dicapai adalah nilai maksimal yaitu 120.

- Kendala yang dihadapi
 - 1) Salah satu komponen penilaian IKPA yaitu penyerapan anggaran terkendala dengan kegiatan belanja 51 yaitu proporsi realisasi tidak sebanding dengan proporsi waktu sehingga menyebabkan nilai tidak maksimal
 - 2) Perhitungan rencana penarikan dana untuk belanja uang makan pegawai sering kali meleset karena kehadiran pegawai sangat dinamis dimana cuti pegawai sangat sulit diprediksi
- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - 1) Realisasi rincian output dipastikan mencapai target 100% karena akan mempengaruhi nilai SMART yang menjadi bagian perhitungan Triwulan IV yaitu sebesar 50%
 - 2) Setiap komponen penilaian IKPA harus direncanakan dan dilaksanakan secara maksimal
 - 3) Selektif atas rencana kegiatan kunjungan kerja atau perjalanan dinas
 - 4) Penyusunan RPD direncanakan sedetil mungkin terutama rencana belanja uang makan

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya KPP Madya Dua Jakarta Timur

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	94%	94,70%	94,39%	120%

sumber : Laporan realisasi anggaran Kementerian Keuangan, SMART-DJA, IKPA DJPB, OMSPAN

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun ini dibandingkan selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan, ketepatan waktu dan penyerapan anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi mempengaruhi realisasi atas target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	-	-	100%	120%

Realisasi capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Madya Dua Jakarta Timur pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan target dan Renja DJP. Kenaikan nilai IKKPA yang terjadi pada tahun 2024 didorong oleh penyerapan anggaran yang baik kegiatan selektif atas kunjungan kerja dan perjalanan dinas guna menunjang kegiatan organisasi.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi

- 1) Setiap komponen penilaian IKPA harus direncanakan dan dilaksanakan secara maksimal
- 2) Selektif atas rencana kegiatan kunjungan kerja atau perjalanan dinas.
- 3) Melakukan pelaporan penggunaan anggaran dengan tepat waktu

3.2. Realisasi Anggaran

Secara garis besar Realisasi Anggaran berdasarkan Program

Berdasarkan alokasi anggaran sesuai dana yang tersedia untuk Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan Program Dukungan Manajemen dalam DIPA Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

Program	2024			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	983,666,000	929,377,580	94.48	964,720,000	836,840,373	86.74
WA Program Dukungan Manajemen	16,595,529,000	15,930,742,722	95.99	17,102,670,000	16,200,037,297	94.72
Jumlah	17,579,195,000	16,860,120,302	95.91	18,067,390,000	17,036,877,670	94.30

Realisasi Program Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur Tahun 2024 secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan Realisasi Program Tahun 2023.

Secara garis besar Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan Berdasarkan alokasi anggaran sesuai dana yang tersedia untuk 4 (empat) Kegiatan, yaitu 1) Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi; 2) Pengawasan dan Penegakan Hukum; 3) Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; dan 4) Pengelolaan Organisasi dan SDM, dalam DIPA Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebagai berikut:

Kegiatan		2024			2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara						
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	298,850,000	292,986,313	98.04	221,244,000	182,722,340	82.59
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	684,816,000	636,391,537	92.93	743,476,000	654,118,033	87.98
Jumlah		983,666,000	929,377,850	94.48	964,720,000	836,840,373	86.74
WA	Program Dukungan Manajemen						
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	15,753,559,000	15,113,663,722	95.94	16,163,944,000	15,328,232,297	94.83
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	841,970,000	817,079,000	97.04	938,726,000	871,805,000	92.87
Jumlah		16,595,529,000	15,930,742,722	95.99	17,102,670,000	16,200,037,297	94.72

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), kualitas, kuantitas, dan persebaran SDM di KPP Madya Dua Jakarta Timur per Desember 2024 dianggap sudah cukup. Pembagian petugas tiap seksi juga dianggap sudah efisien sehingga tidak ada gangguan dalam menjalankan proses bisnis sehari-hari.

3.4. Kinerja Lain-lain

- Kantor Pelayanan Terbaik

Dalam rangka evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan public serta pemberian apresiasi terhadap Kantor Pelayanan Pajak, KPP Madya Dua Jakarta Timur turut berpartisipasi dalam agenda Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2024,

Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2023 berhasil diraih oleh KPP Madya Dua Jakarta Timur untuk terus mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. KPP Madya Dua Jakarta Timur berhasil mewakili Kanwil DJP Jakarta Timur sebagai Kantor Pelayanan Terbaik pada Tahun 2024, sinergitas antar pegawai dan pelayanan yang memuaskan terhadap wajib pajak menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.



- Lomba Cepat Tepat Perpajakan 2024**

KPP Madya Dua Jakarta Timur Bersama dengan Kanwil DJP Jakarta Timur menyelenggarakan Lomba Cepat Tepat Perpajakan 2024 pada bulan Agustus Tahun 2024 tingkat SMA/SMK sederajat, dalam rangka menambah wawasan dan edukasi serta pengetahuan perpajakan, Demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 KPP Madya Dua Jakarta Timur memberikan kesempatan, pengalaman dan membangkitkan minat belajar pada siswa/i SMA/SMK/MA sederajat.



- Pajak Bertutur**

Kegiatan Pajak Bertutur Tahun 2024 telah dilaksanakan secara serentak oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 7 Agustus 2024, KPP Madya Dua Jakarta Timur dalam rangka melakukan kampanye Inklusi Kesadaran Pajak memilih SMAN 48 Jakarta sebagai partisipan Lokasi kegiatan Pajak Bertutur, dengan tema **“Lampau Batas, Bersatu untuk Indonesia Emas”** edukasi perpajakan kepada generasi muda berhasil tersampaikan. Dengan memberikan pesan kepada para siswa pentingnya APBN demi keberlangsungan negara, bangkit untuk Indonesia Emas 2045.



3.5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

KPP Madya Dua Jakarta Timur senantiasa berivonasi dan mengevaluasi setiap kinerja secara berkala, dengan kegiatan Morning Activity MaduJati (MacDi) akan menambah sinergi serta motivasi bagi pegawai, kegiatan menambah informasi dan mengembangkan kompetensi dan dilaksanakan setiap bulannya.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi pada tahun 2024.

Keberhasilan yang telah dicapai Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur dalam tahun 2024. adalah:

- a. KPP Madya Dua berhasil meraih capaian penerimaan sebesar 100.06%
- b. Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur juga mencapai tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun pajak 2024 dengan capaian 117,41%.
- c. Dari anggaran yang disampaikan pada awal tahun telah terserap secara optimal pada tahun 2024 ini. KPP Madya Dua Jakarta Timur mempunyai pagu anggaran Rp18.067.390.000 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp16.965.355.670. yaitu sebesar 93.90% dari pagu awal tahun.

Pada tahun 2023 KPP Madya Dua Jakarta Timur telah berhasil meraih predikat ZIWBK dan sedang bersiap untuk mengikuti WBBM di tahun 2026. Untuk menjaga dan mempertahankan predikat ZIWBK serta untuk mempersiapkan WBBM, KPP Madya Dua mempunyai beberapa rencana kerja diantaranya:

1. Terus meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada Wajib Pajak;
2. Melakukan pemantauan terhadap inovasi-inovasi yang telah ada di tahun 2024 agar tetap berjalan dengan baik di tahun-tahun selanjutnya;
3. Melakukan peningkatan inovasi-inovasi yang telah ada sebelumnya dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menunjang kemudahan Wajib Pajak dalam memperoleh pelayanan serta mempermudah pegawai internal untuk melaksanakan administrasi kantor;
4. Melaksanakan morning activity secara rutin setiap dua minggu sekali dengan berbagai pembahasan dan diskusi dalam kegiatannya;
5. Menyusun strategi-strategi kinerja agar penerimaan di tahun 2024 dapat tercapai;

Dengan disusunnya LAKIN ini. diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan. baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak



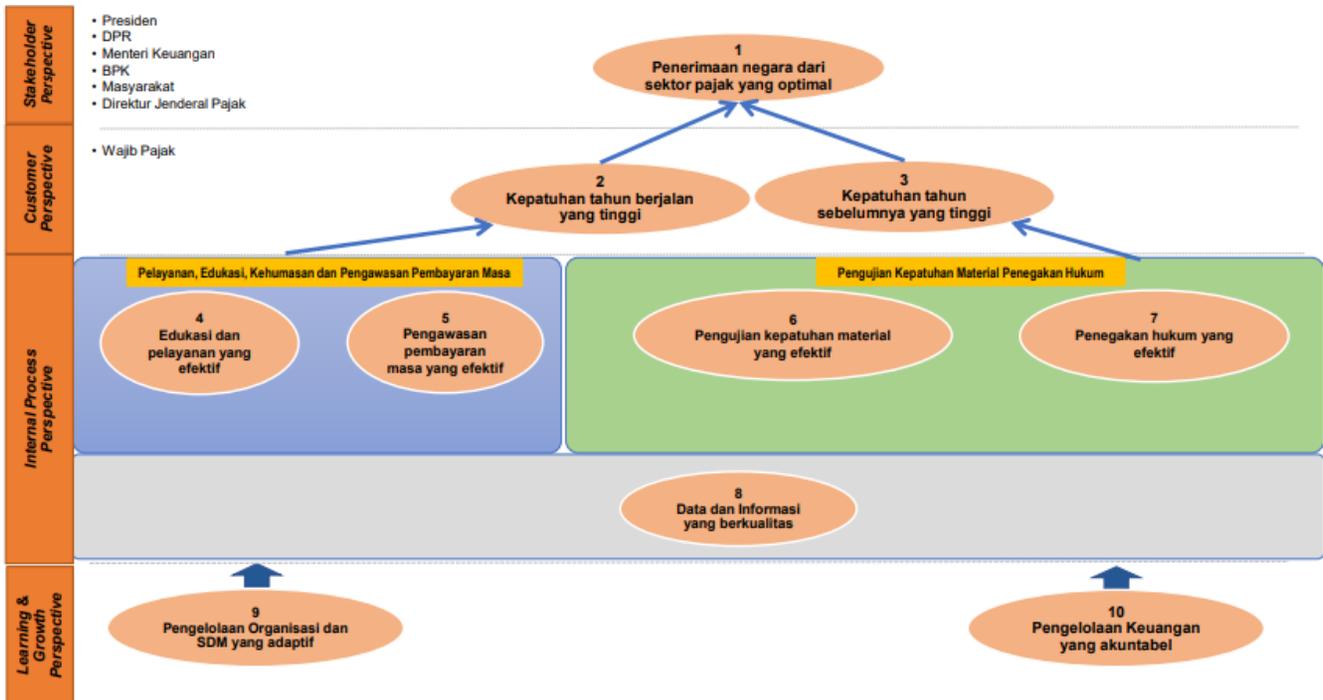
sehingga dapat memberikan umpan balik peningkatan kinerja pada periode berikutnya.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/WPJ.20/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA
JAKARTA TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi:
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA TIMUR KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	995.116.000
1 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	198.300.000
2 Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	796.816.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp	15.779.347.000
1 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	15.677.573.000
2 Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	101.774.000
Total	Rp	16.774.463.000

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua
Jakarta Timur



Ditandatangani secara elektronik
Dasto lesyanto



Ditandatangani secara elektronik
Immanuel Ambarita



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA TIMUR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua
Jakarta Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Immanuel Ambarita



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA TIMUR
Tahun 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Laporan rasio perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan melalui aplikasi mandor	Q1: 1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak secara optimal 2. Melakukan edukasi secara langsung maupun virtual kepada seluruh Wajib Pajak 3. Meningkatkan saran dan prasana untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh Wajib Pajak 4. Meberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak	Q1: 1. Kepuasan Wajib Pajak 2. Tujuan edukasi kepada Wajib Pajak tersampaikan	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
				Q2: 1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak secara optimal	Q2: Laporan rasio perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan melalui aplikasi mandor			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Melakukan edukasi secara langsung maupun virtual kepada seluruh Wajib Pajak 3. Meningkatkan saran dan prasana untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh Wajib Pajak 4. Meberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak				
				Q3: 1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak secara optimal 2. Melakukan edukasi secara langsung maupun virtual kepada seluruh Wajib Pajak 3. Meningkatkan saran dan prasana untuk memberikan pelayanan prima	Q3: 1. Kepuasan Wajib Pajak 2. Tujuan edukasi kepada Wajib Pajak tersampaikan			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>kepada seluruh Wajib Pajak</p> <p>4. Meberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak</p>				
				<p>Q4:</p> <p>1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak secara optimal</p> <p>2. Melakukan edukasi secara langsung maupun virtual kepada seluruh Wajib Pajak</p> <p>3. Meningkatkan saran dan prasana untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh Wajib Pajak</p> <p>4. Meberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak</p>	<p>Q4:</p> <p>Laporan rasio perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan melalui aplikasi mandor</p>			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Hasil Survey Efektifitas Penyuluhan dan Pelayanan yang memuaskan	Q1: 1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak secara optimal 2. Melakukan edukasi secara langsung maupun virtual kepada seluruh Wajib Pajak 3. Meningkatkan saran dan prasana untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh Wajib Pajak 4. Meberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak Q2: 1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak secara optimal 2. Melakukan edukasi secara langsung maupun virtual	Q1: 1. Kepuasan Wajib Pajak 2. Tujuan edukasi kepada Wajib Pajak tersampaikan Q2: 1. Kepuasan Wajib Pajak 2. Tujuan edukasi kepada Wajib Pajak tersampaikan	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pelayanan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				kepada seluruh Wajib Pajak 3. Meningkatkan saran dan prasana untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh Wajib Pajak 4. Meberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak				
				Q3: 1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak secara optimal 2. Melakukan edukasi secara langsung maupun virtual kepada seluruh Wajib Pajak 3. Meningkatkan saran dan prasana untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh Wajib Pajak	Q3: 1. Kepuasan Wajib Pajak 2. Tujuan edukasi kepada Wajib Pajak tersampaikan			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				4. Meberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak				
				Q4: 1. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak secara optimal 2. Melakukan edukasi secara langsung maupun virtual kepada seluruh Wajib Pajak 3. Meningkatkan saran dan prasana untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh Wajib Pajak 4. Meberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak	Q4: 1. Hasil Survey Efektifitas Penyuluhan dan Pelayanan yang memuaskan			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal Produk Hukum 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penelitian data pelaporan dan/atau pembayaran Wajib Pajak atas setoran rutin (PPH Pasal 21, 25 dan PPN) serta setoran non rutin; Menerbitkan Surat Teguran Masa kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pemenuhan kewajiban setoran/pelaporan rutin; Menerbitkan SP2DK atas tidak dipenuhinya kewajiban setor dan/atau lapor SPT Masa Rutin (PPH Pasal 21, 25 dan PPN) serta non rutin; Meneliti dan membuat SP2DK atas kepatuhan material atas pemenuhan kewajiban tahun berjalan baik 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Nominatif Wajib Pajak Surat Teguran Masa SP2DK Surat Tugas Laporan Kunjungan LHP2DK Berita Acara Konseling 	Januari s.d. Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> Seksi Pengawasan I Seksi Pengawasan II Seksi Pengawasan III Seksi Pengawasan IV Seksi Pengawasan V Seksi Pengawasan VI 	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)	
				Kegiatan	Output				
				setoran rutin maupun non rutin; 5. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak sehubungan dengan SP2DK Pengawasan Pembayaran Masa; 6. Membuat Hasil Berita Acara Konseling					
				Q2: 1. Melakukan penelitian data pelaporan dan/atau pembayaran Wajib Pajak atas setoran rutin (PPH Pasal 21, 25 dan PPN) serta setoran non rutin; 2. Menerbitkan Surat Teguran Masa kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pemenuhan kewajiban setoran/pelaporan rutin; 3. Menerbitkan SP2DK atas tidak dipenuhinya kewajiban setor	Q2: 1. Daftar Nominatif Wajib Pajak 2. Surat Teguran Masa 3. SP2DK 4. Surat Tugas 5. Laporan Kunjungan 6. LHP2DK 7. Berita Acara Konseling				



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>dan/atau lapor SPT Masa Rutin (PPh Pasal 21, 25 dan PPN) serta non rutin;</p> <p>4. Meneliti dan membuat SP2DK atas kepatuhan material atas pemenuhan kewajiban tahun berjalan baik setoran rutin maupun non rutin;</p> <p>5. Melakukan konseling dengan Wajib Pajaksehubungan dengan SP2DK Pengawasan Pembayaran Masa;</p> <p>6. Membuat Hasil Berita Acara Konseling</p>				
			<p>Q3:</p> <p>1. Melakukan penelitian data pelaporan dan/atau pembayaran Wajib Pajak atas setoran rutin (PPh Pasal 21, 25 dan PPN) serta setoran non rutin;</p>	<p>Q3:</p> <p>1. Daftar Nominatif Wajib Pajak</p> <p>2. Surat Teguran Masa</p> <p>3. SP2DK</p> <p>4. Surat Tugas</p> <p>5. Laporan Kunjungan</p> <p>6. LHP2DK</p>				



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>2.Menerbitkan Surat Teguran Masa kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pemenuhan kewajiban setoran/pelaporan rutin;</p> <p>3.Menerbitkan SP2DK atas tidak dipenuhinya kewajiban setor dan/ atau lapor SPT Masa Rutin (PPh Pasal 21, 25 dan PPN) serta non rutin;</p> <p>4.Meneliti dan membuat SP2DK atas kepatuhan material atas pemenuhan kewajiban tahun berjalan baik setoran rutin maupun non rutin;</p> <p>5.Melakukan konseling dengan Wajib Pajaksehubungan dengan SP2DK Pengawasan Pembayaran Masa;</p>	<p>7. Berita Acara Konseling</p>			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				6.Membuat Hasil Berita Acara Konseling				
				<p>Q4:</p> <p>1.Melakukan penelitian data pelaporan dan/atau pembayaran Wajib Pajak atas setoran rutin (PPh Pasal 21, 25 dan PPN) serta setoran non rutin;</p> <p>2.Menerbitkan Surat Teguran Masa kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pemenuhan kewajiban setoran/pelaporan rutin;</p> <p>3.Menerbitkan SP2DK atas tidak dipenuhinya kewajiban setor dan/atau lapor SPT Masa Rutin (PPh Pasal 21, 25 dan PPN) serta non rutin;</p> <p>4.Meneliti dan membuat SP2DK atas kepatuhan material atas pemenuhan kewajiban</p>	<p>Q4:</p> <p>1. Daftar Nominatif Wajib Pajak</p> <p>2. Surat Teguran Masa</p> <p>3. SP2DK</p> <p>4. Surat Tugas</p> <p>5. Laporan Kunjungan</p> <p>6. LHP2DK</p> <p>7. Berita Acara Konseling</p>			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				tahun berjalan baik setoran rutin maupun non rutin; 5. Melakukan konseling dengan Wajib Pajakhubungan dengan SP2DK Pengawasan Pembayaran Masa; 6. Membuat Hasil Berita Acara Konseling				



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Pengujian kepatuhan material yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> Pengujian kepatuhan material yang efektif Produk Hukum 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meneliti data pelaporan dan/atau pembayaran Wajib Pajak atas Tahun Pajak selain Tahun Pajak Berjalan secara komprehensif; Menindaklanjuti data penguji dan pemicu yang tersedia pada seluruh aplikasi pengawasan; Menyusun konsep LHPt sesuai standarisasi LHPt Komprehensif sebagai laporan yang memuat hasil penelitian formal dan material atas tahun pajak yang diteliti; Melakukan pembahasan hasil penelitian yang melibatkan Peneliti, 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Nominatif Wajib Pajak Surat Teguran Masa SP2DK Surat Tugas Laporan Kunjungan LHP2DK Berita Acara Konseling 	Januari s.d. Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> Seksi Pengawasan I Seksi Pengawasan II Seksi Pengawasan III Seksi Pengawasan IV Seksi Pengawasan V Seksi Pengawasan VI 	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Kepala Seksi dan Supervisor; 5. Menerbitkan SP2DK hasil pembahasan Tim Peneliti dengan Supervisor Pemeriksa; 6. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak sehubungan dengan SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material; 7. Membuat Hasil Berita Acara Konseling; 8. Membuat LHP2DK atas hasil konseling dengan Wajib Pajak dengan pilihan tindak lanjut: Pengawasan, Diusulkan Pemeriksaan/Buper 9. Input data realisasi/menutup SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material.				
				Q2: 1. Meneliti data pelaporan dan/atau	Q2: 1. Daftar Nominatif Wajib Pajak			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				pembayaran Wajib Pajak atas Tahun Pajak selain Tahun Pajak Berjalan secara komprehensif; 2. Menindaklanjuti data pengujian dan pemicu yang tersedia pada seluruh aplikasi pengawasan; 3. Menyusun konsep LHPt sesuai standarisasi LHPt Komprehensif sebagai laporan yang memuat hasil penelitian formal dan material atas tahun pajak yang diteliti; 4. Melakukan pembahasan hasil penelitian yang melibatkan Peneliti, Kepala Seksi dan Supervisor; 5. Menerbitkan SP2DK hasil pembahasan Tim	2. Surat Teguran Masa 3. SP2DK 4. Surat Tugas 5. Laporan Kunjungan 6. LHP2DK 7. Berita Acara Konseling dst			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Peneliti dengan Supervisor Pemeriksa; 6. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak sehubungan dengan SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material; 7. Membuat Hasil Berita Acara Konseling; 8. Membuat LHP2DK atas hasil konseling dengan Wajib Pajak dengan pilihan tindak lanjut: Pengawasan, Diusulkan Pemeriksaan/Buper 9. Input data realisasi/menutup SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material.				
				Q3: 1. Meneliti data pelaporan dan/atau pembayaran Wajib Pajak atas Tahun Pajak selain Tahun	Q3: 1. Daftar Nominatif Wajib Pajak 2. Surat Teguran Masa 3. SP2DK 4. Surat Tugas 5. Laporan Kunjungan			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Pajak Berjalan secara komprehensif; 2. Menindaklanjuti data pengujian dan pemicu yang tersedia pada seluruh aplikasi pengawasan; 3. Menyusun konsep LHPt sesuai standarisasi LHPt Komprehensif sebagai laporan yang memuat hasil penelitian formal dan material atas tahun pajak yang diteliti; 4. Melakukan pembahasan hasil penelitian yang melibatkan Peneliti, Kepala Seksi dan Supervisor; 5. Menerbitkan SP2DK hasil pembahasan Tim Peneliti dengan Supervisor Pemeriksa;	6. LHP2DK 7. Berita Acara Konseling			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>6. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak sehubungan dengan SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material;</p> <p>7. Membuat Hasil Berita Acara Konseling;</p> <p>8. Membuat LHP2DK atas hasil konseling dengan Wajib Pajak dengan pilihan tindak lanjut: Pengawasan, Diusulkan Pemeriksaan/Buper;</p> <p>9. Input data realisasi/menutup SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material.</p>				
				<p>Q4:</p> <p>1. Meneliti data pelaporan dan/atau pembayaran Wajib Pajak atas Tahun Pajak selain Tahun Pajak Berjalan</p>	<p>Q4:</p> <p>1. Daftar Nominatif Wajib Pajak</p> <p>2. Surat Teguran Masa</p> <p>3. SP2DK</p> <p>4. Surat Tugas</p> <p>5. Laporan Kunjungan</p> <p>6. LHP2DK</p>			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>secara komprehensif;</p> <p>2. Menindaklanjuti data pengujian dan pemicu yang tersedia pada seluruh aplikasi pengawasan;</p> <p>3. Menyusun konsep LHPt sesuai standarisasi LHPt Komprehensif sebagai laporan yang memuat hasil penelitian formal dan material atas tahun pajak yang diteliti;</p> <p>4. Melakukan pembahasan hasil penelitian yang melibatkan Peneliti, Kepala Seksi dan Supervisor;</p> <p>5. Menerbitkan SP2DK hasil pembahasan Tim Peneliti dengan Supervisor Pemeriksa;</p>	<p>7. Berita Acara Konseling</p>			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>6. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak sehubungan dengan SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material;</p> <p>7. Membuat Hasil Berita Acara Konseling;</p> <p>8. Membuat LHP2DK atas hasil konseling dengan Wajib Pajak dengan pilihan tindak lanjut: Pengawasan, Diusulkan Pemeriksaan/Buper;</p> <p>9. Input data realisasi/menutup SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material.</p>				



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
5.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Pengujian kepatuhan material yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> Pengujian kepatuhan material yang efektif Produk Hukum 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meneliti data pelaporan dan/atau pembayaran Wajib Pajak atas Tahun Pajak selain Tahun Pajak Berjalan secara komprehensif; Menindaklanjuti data penguji dan pemicu yang tersedia pada seluruh aplikasi pengawasan; Menyusun konsep LHPt sesuai standarisasi LHPt Komprehensif sebagai laporan yang memuat hasil penelitian formal dan material atas tahun pajak yang diteliti; Melakukan pembahasan hasil penelitian yang melibatkan Peneliti, 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Nominatif Wajib Pajak Surat Teguran Masa SP2DK Surat Tugas Laporan Kunjungan LHP2DK Berita Acara Konseling 	Januari s.d. Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> Seksi Pengawasan I Seksi Pengawasan II Seksi Pengawasan III Seksi Pengawasan IV Seksi Pengawasan V Seksi Pengawasan VI 	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Kepala Seksi dan Supervisor Pemeriksa; 5. Menerbitkan SP2DK hasil pembahasan Tim Peneliti dengan Supervisor Pemeriksa; 6. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak sehubungan dengan SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material; 7. Membuat Hasil Berita Acara Konseling; 8. Melakukan visit (jika diperlukan) dan Menyusun Laporan Hasil Kunjungan; 9. Membuat LHP2DK atas hasil konseling dengan Wajib Pajak dengan pilihan tindak lanjut : Diusulkan Pemeriksaan/Buper/I DLP				



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q2: 1. Meneliti data pelaporan dan/ atau pembayaran Wajib Pajak atas Tahun Pajak selain Tahun Pajak Berjalan secara komprehensif; 2. Menindaklanjuti data penguji dan pemicu yang tersedia pada seluruh aplikasi pengawasan; 3. Menyusun konsep LHPt sesuai standarisasi LHPt Komprehensif sebagai laporan yang memuat hasil penelitian formal dan material atas tahun pajak yang diteliti; 4. Melakukan pembahasan hasil penelitian yang melibatkan Peneliti,	Q2: 1. Daftar Nominatif Wajib Pajak 2. Surat Teguran Masa 3. SP2DK 4. Surat Tugas 5. Laporan Kunjungan 6. LHP2DK 7. Berita Acara Konseling			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)	
				Kegiatan	Output				
				Kepala Seksi dan Supervisor Pemeriksa; 5. Menerbitkan SP2DK hasil pembahasan Tim Peneliti dengan Supervisor Pemeriksa; 6. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak sehubungan dengan SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material; 7. Membuat Hasil Berita Acara Konseling; 8. Melakukan visit (jika diperlukan) dan Menyusun Laporan Hasil Kunjungan; 9. Membuat LHP2DK atas hasil konseling dengan Wajib Pajak dengan pilihan tindak lanjut : Diusulkan Pemeriksaan/Buper/I DLP					
				Q3: 1. Meneliti data pelaporan dan/atau	Q3: 1. Daftar Nominatif Wajib Pajak				



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				pembayaran Wajib Pajak atas Tahun Pajak selain Tahun Pajak Berjalan secara komprehensif; 2. Menindaklanjuti data pengujian dan pemicu yang tersedia pada seluruh aplikasi pengawasan; 3. Menyusun konsep LHPt sesuai standarisasi LHPt Komprehensif sebagai laporan yang memuat hasil penelitian formal dan material atas tahun pajak yang diteliti; 4. Melakukan pembahasan hasil penelitian yang melibatkan Peneliti, Kepala Seksi dan Supervisor Pemeriksa; 5. Menerbitkan SP2DK hasil pembahasan Tim	2. Surat Teguran Masa 3. SP2DK 4. Surat Tugas 5. Laporan Kunjungan 6. LHP2DK 7. Berita Acara Konseling			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Peneliti dengan Supervisor Pemeriksa; 6. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak sehubungan dengan SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material; 7. Membuat Hasil Berita Acara Konseling; 8. Melakukan visit (jika diperlukan) dan Menyusun Laporan Hasil Kunjungan; 9. Membuat LHP2DK atas hasil konseling dengan Wajib Pajak dengan pilihan tindak lanjut : Diusulkan Pemeriksaan/Buper/I DLP				
				Q4: 1. Meneliti data pelaporan dan/atau pembayaran Wajib Pajak atas Tahun Pajak selain Tahun	Q4: 1. Daftar Nominatif Wajib Pajak 2. Surat Teguran Masa 3. SP2DK 4. Surat Tugas 5. Laporan Kunjungan			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Pajak Berjalan secara komprehensif; 2. Menindaklanjuti data pengujian dan pemicu yang tersedia pada seluruh aplikasi pengawasan; 3. Menyusun konsep LHPt sesuai standarisasi LHPt Komprehensif sebagai laporan yang memuat hasil penelitian formal dan material atas tahun pajak yang diteliti; 4. Melakukan pembahasan hasil penelitian yang melibatkan Peneliti, Kepala Seksi dan Supervisor Pemeriksa; 5. Menerbitkan SP2DK hasil pembahasan Tim Peneliti dengan Supervisor Pemeriksa;	6. LHP2DK 7. Berita Acara Konseling			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>6. Melakukan konseling dengan Wajib Pajak sehubungan dengan SP2DK Pengawasan Kepatuhan Material;</p> <p>7. Membuat Hasil Berita Acara Konseling;</p> <p>8. Melakukan visit (jika diperlukan) dan Menyusun Laporan Hasil Kunjungan;</p> <p>9. Membuat LHP2DK atas hasil konseling dengan Wajib Pajak dengan pilihan tindak lanjut : Diusulkan Pemeriksaan/Buper/I DLP</p>				



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
6.	Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP dan penyediaan bahan baku	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Pengelolaan Komite Kepatuhan yang Efektif	Q1: 1. Menetapkan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak 2. menyusun DSP4 adjusment KPP 3. menetapkan DSPT, DPP, DSPP, DSPC berdasarkan DSP4 kolaboratif yang ditetapkan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP 4. mengusulkan daftar Wajib Pajak strategis	Q1: 1. DSP4 Kolaboratif 2. Daftar nominative Wajib Pajak Strategis	Januari s.d. Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI 7. Seluruh Supervisor Kelompok Pemeriksa Pajak	-
				Q2: 1. Menetapkan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak 2. menyusun DSP4 adjusment KPP 3. menetapkan DSPT, DPP, DSPP, DSPC berdasarkan DSP4 kolaboratif yang ditetapkan oleh	Q2: 1. DSP4 Kolaboratif			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP				
				Q3: 1. Menetapkan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak 2. menyusun DSP4 adjusment KPP 3. menetapkan DSPT, DPP, DSPP, DSPC berdasarkan DSP4 kolaboratif yang ditetapkan oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP	Q3: 1. DSP4 Kolaboratif			
				Q4: 1. Menetapkan Rencana Pengamanan Penerimaan Pajak 2. menyusun DSP4 adjusment KPP 3. menetapkan DSPT, DPP, DSPP, DSPC berdasarkan DSP4 kolaboratif yang ditetapkan oleh	Q4: 1. DSP4 Kolaboratif			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP				
7.	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Penegakan hukum yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Pemeriksaan dan Penilaian berjalan efektif Laporan Hasil Pemeriksaan Penerbitan SKP Surat Tagihan Pajak Data Potensi DSPP 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan Menerbitkan SKP Melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak Melaksanakan pemeriksaan atas restitusi pada SPT Tahunan atau SPT Masa PPN Lebih Bayar 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Pemeriksaan Penerbitan SKP Surat Tagihan Pajak Data Potensi DSPP 	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
				<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) 	<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Pemeriksaan Penerbitan SKP Surat Tagihan Pajak 			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan 3. Menerbitkan SKP 4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak 5. Melaksanakan pemeriksaan atas restitusi pada SPT Tahunan atau SPT Masa PPN Lebih Bayar	4. Data Potensi DSPP			
				Q3: 1. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) 2. Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan 3. Menerbitkan SKP 4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan	Q3: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Penerbitan SKP 3. Surat Tagihan Pajak 4. Data Potensi DSPP			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				pemenuhan kewajiban wajib pajak 5. Melaksanakan pemeriksaan atas restitusi pada SPT Tahunan atau SPT Masa PPN Lebih Bayar				
				Q4: 1. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) 2. Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan 3. Menerbitkan SKP 4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak 5. Melaksanakan pemeriksaan atas restitusi pada SPT Tahunan atau SPT Masa PPN Lebih Bayar	Q4: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan 2. Penerbitan SKP 3. Surat Tagihan Pajak 4. Data Potensi DSPP			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
8.	Tingkat efektivitas Penagihan	Penegakan hukum yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penagihan berjalan efektif 2. Tindakan Penagihan 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan serangkaian kegiatan penelitian untuk menerbitkan surat teguran 2. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak 3. Melakukan serangkaian kegiatan untuk menerbitkan surat paksa dengan penelitian kantor dan juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 4. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pemblokiran atas rekening wajib pajak 5. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menyita aset wajib pajak <p>Q2:</p>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Surat Teguran; 2. Pemberitahuan Surat Paksa; 3. Pemblokiran; 4. Penyitaan; dan 5. Penjualan Barang Sitaan. 6. Surat Tugas 7. Laporan pelaksanaan tindakan penagihan <p>Q2:</p>	Januari s.d. Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				1. Melakukan serangkaian kegiatan penelitian untuk menerbitkan surat teguran 2. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak 3. Melakukan serangkaian kegiatan untuk menerbitkan surat paksa dengan penelitian kantor dan juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 4. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pemblokiran atas rekening wajib pajak 5. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menyita aset wajib pajak	1. Penerbitan Surat Teguran; 2. Pemberitahuan Surat Paksa; 3. Pemblokiran; 4. Penyitaan; dan 5. Penjualan Barang Sitaan. 6. Surat Tugas 7. Laporan pelaksanaan tindakan penagihan			
				Q3: 1. Melakukan serangkaian kegiatan penelitian	Q3: 1. Penerbitan Surat Teguran;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<ul style="list-style-type: none"> untuk menerbitkan surat teguran 2. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak 3. Melakukan serangkaian kegiatan untuk menerbitkan surat paksa dengan penelitian kantor dan juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 4. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pemblokiran atas rekening wajib pajak 5. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menyita aset wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pemberitahuan Surat Paksa; 3. Pemblokiran; 4. Penyitaan; dan 5. Penjualan Barang Sitaan. 6. Surat Tugas 7. Laporan pelaksanaan tindakan penagihan 			
				Q4: 1. Melakukan serangkaian kegiatan penelitian untuk menerbitkan surat teguran	Q4: 1. Penerbitan Surat Teguran; 2. Pemberitahuan Surat Paksa;			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak 3. Melakukan serangkaian kegiatan untuk menerbitkan surat paksa dengan penelitian kantor dan juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 4. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pemblokiran atas rekening wajib pajak 5. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menyita aset wajib pajak	3. Pemblokiran; 4. Penyitaan; dan 5. Penjualan Barang Sitaan. 6. Surat Tugas 7. Laporan pelaksanaan tindakan penagihan			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
9.	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Penegakan hukum yang efektif	Daftar Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan	Q1: 1. Identifikasi Wajib Pajak yang dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan 2. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke seksi P3	Q1: Daftar Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan	Januari s.d. Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI 7. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
				Q2: 1. Identifikasi Wajib Pajak yang dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan 2. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke seksi P3	Q2: Daftar Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan			
				Q3: 1. Identifikasi Wajib Pajak yang dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan	Q3: Daftar Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke seksi P3				
				Q4: 1. Identifikasi Wajib Pajak yang dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan 2. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke seksi P3	Q4: Daftar Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan			
10.	Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	Data dan informasi yang berkualitas	1. Laporan Pengamatan	Q1: 1. Pembentukan tim pengamatan 2. Pemilihan wajib pajak untuk dilakukan pengamatan 3. Melakukan pengamatan Q2: 1. Pemilihan wajib pajak untuk dilakukan pengamatan 2. Melakukan pengamatan	Q1: 1. Tim Pengamatan 2. Laporan pengamatan Q2: Laporan pengamatan	Januari s.d. Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: 1. Pemilihan wajib pajak untuk dilakukan pengamatan 2. Melakukan pengamatan	Q3: Laporan pengamatan		6. Seksi Pengawasan VI 7. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	
				Q4: 1. Pemilihan wajib pajak untuk dilakukan pengamatan 2. Melakukan pengamatan	Q4: Laporan pengamatan			
11.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	1. Hasil Uji Kompetensi 2. Hasil Assessment Center	Q1: 1. Melakukan persiapan sebelum pelaksanaan uji kompetensi bagi pelaksana Q2: 1. Melakukan persiapan sebelum pelaksanaan uji kompetensi bagi Fungsional Q3: 1. Melakukan persiapan sebelum pelaksanaan Assessment Center bagi pejabat	Q1: 1. Hasil Uji Kompetensi Pelaksana Umum Q2: 1. Hasil Uji Kompetensi Fungsional Q3: 1. Hasil Assessment Center Pejabat Pengawas	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>pengawas apabila dilaksanakan di triwulan III</p> <p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan persiapan sebelum pelaksanaan uji kompetensi bagi Fungsional 3. Melakukan persiapan sebelum pelaksanaan Assessment Center bagi pejabat pengawas apabila dilaksanakan di triwulan IV 4. Mengevaluasi hasil assessment center dan hasil uji kompetensi 5. Mengirimkan nota dinas permintaan usulan reassessment center bagi pejabat pengawas yang hasilnya berada di bawah JPM 	<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil Uji Kompetensi Fungsional 3. Hasil Assessment Center Pejabat Pengawas 			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
12.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Hasil Survei Penilaian Integritas Unit	Q4: 1. Menyusun dan mengirimkan nota dinas permintaan daftar wajib pajak sebagai responden pengisian survey 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengisian survey yang dilakukan oleh responden kepada masing-masing seksi	Q4: 1. Longlist Responden 2. Hasil Survei Penilaian Integritas Unit	Triwulan IV 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
13.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen Kinerja Pegawai Laporan Manajemen Kinerja Organisasi Laporan Manajemen Risiko 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan laporan manajemen kinerja dan manajemen risiko Penyusunan bahan paparan DKO Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja pegawai <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan laporan manajemen kinerja dan manajemen risiko Penyusunan bahan paparan DKO Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja pegawai <p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan laporan manajemen kinerja dan manajemen risiko Penyusunan bahan paparan DKO 	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen Kinerja Pegawai Laporan Manajemen Kinerja Organisasi Laporan Manajemen Risiko <p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen Kinerja Pegawai Laporan Manajemen Kinerja Organisasi Laporan Manajemen Risiko <p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Manajemen Kinerja Pegawai Laporan Manajemen Kinerja Organisasi 	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja pegawai Q4: 1. Penyusunan laporan manajemen kinerja dan manajemen risiko 2. Penyusunan bahan paparan DKO 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja pegawai	3. Laporan Manajemen Risiko Q4: 1. Laporan Manajemen Kinerja Pegawai 2. Laporan Manajemen Kinerja Organisasi 3. Laporan Manajemen Risiko			
14.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Capaian IKU Pelaksanaan Anggaran	Q1: 1. Pengelolaan dana anggaran (DIPA) 2. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana anggaran (DIPA) 3. Melakukan revisi DIPA 4. Penghitungan capaian IKPA Q2:	Q1: 1. Nilai IKPA 2. Nilai SMART Q2: 1. Nilai IKPA	Januari s.d. Desember 2024	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana anggaran (DIPA) 2. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana anggaran (DIPA) 3. Melakukan revisi DIPA 4. Penghitungan capaian IKPA 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Nilai SMART 			
				<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana anggaran (DIPA) 2. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana anggaran (DIPA) 3. Melakukan revisi DIPA 4. Penghitungan capaian IKPA 	<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKPA 2. Nilai SMART 			
				<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana anggaran (DIPA) 2. Pertanggungjawaban atas pengelolaan 	<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai IKPA 2. Nilai SMART 			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				dana anggaran (DIPA) 3. Melakukan revisi DIPA 4. Penghitungan capaian IKPA				

Jakarta, 31 Januari 2024
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Immanuel Ambarita



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Immanuel Ambarita	NAMA	Dasto Ledyanto	
NIP	197105041990121001	NIP	196612021992011001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur	JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Timur)

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
 Immanuel Ambarita
 197105041990121001

Jakarta, 31 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
 Dasto Ledyanto
 196612021992011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	109 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Immanuel Ambarita
197105041990121001

Jakarta, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Dasto Ledyanto
196612021992011001

